

## PARTISIPASI MASYARAKAT DAN PERBAIKAN AKSES MEMASUKI SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA<sup>1</sup>

Oleh:  
Suyata

### **Abstract**

*This empirical study was carried out to answer feasibility questions for junior secondary education (JSE) development project in terms of the community acceptance, support, and participation. There was belief, held widely, that the willingness and the ability of the community to assume their part, generate, and mobilize their resources would guarantee good result. Accordingly, the dynamic interactions between supply and demand within the education sector should be clarified prior to the beginning of the project. Improving JSE access means bringing JSE closer to the legitimate users by taking into account the best matching dynamic, interactive supply-demand within the socio-economic and cultural context. The assessment questions should deal with both the micro (school) level and the macro (community) one. The methodology (procedure and rules) relied upon rapid assessment through intensive educational and social discourses with a wide range of educational stakeholders in the bureaucratic offices and the community members in the field. An inventory and the interview guide were developed supported by secondary data and school observations. The general conclusions (related to policies not strictly to research) included: (1) the general public and school community constituencies tended to assume that the key to improve the JSE access was the supply of schooling facilities, especially school building;*

---

<sup>1</sup> Tulisan ini bersumber pada hasil studi kelayakan dan laporan "Community participation in school development: Access, demand, and school construction. Technical Report NO.2. (1966). Jakarta: MOEC, DGPSE, DSE. Suatu individual assignment diberikan oleh Bank Dunia kepada penulis untuk melaksanakan studi kelayakan pembangunan SLTP dilihat dari partisipasi masyarakat. Berdasarkan TOR, proposal diajukan peneliti, dibicarakan bersama dengan representatif Bank Dunia di Indonesia, temuan awal dibahas dalam suatu seminar, dan draft final dibahas dalam seminar yang lebih formal dan luas pesertanya. Hal penting yang perlu dikemukakan adalah keterikatan peneliti untuk tidak mempublikasikan hasil-hasil ini dalam jangka waktu tiga tahun dari pelaporan akhir. Tulisan ini refleksi lebih jauh dari temuan-temuan yang dihasilkan studi kelayakan tersebut.

*(2) The well-balanced supply and demand existed in both the affluent contexts and the poor one; meanwhile the poor balance found in the dense and populous areas and the mobilizing areas; (3) The poor supply - demand required different policy treatments to generate community participation. Community participation for JSE access, especially by parent, occurred by external request, school based, and narrow in nature. Those related to generating JSE demand found neglected addressed to general issues without target-specific. Good practices of community participation under well-managed plans and implementation at the micro (school) as well as the macro (community) level were irregularly found.*

*Key words: JSE developmet, access, suply-demand, community participation.*

## **Pendahuluan**

Pengalaman melaksanakan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun selama dua tahun pertama mengisyaratkan dijumpainya hal-hal kritical. Pertama, kebutuhan (*demand*) memasuki pendidikan sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP) dianggap telah ada di semua kelompok masyarakat sehingga penyediaan tempat belajar dan fasilitasnya (*supply*) sebagai permasalahan utama. Kedua, adanya paradoks berupa ketersediaan supply yang tak dimanfaatkan bersamaan dengan kelebihan demand di dalam keterbatasan supply. Ketiga, adanya kecenderungan berharap terlalu besar kepada sektor usaha pendidikan oleh pemerintah di dalam kondisi finansial yang semakin berkurang yang berakibat pada sempitnya basis sumber-sumber pendidikan. Kelima, fenomena kesediaan masyarakat mengambil bagian peranan pendidikan melalui berbagai usaha, tetapi belum dikembangkan secara optimal dan terpolakan. Isu pokok bagi proyek perluasan wajib belajar tingkat SLTP adalah mengusahakan dan menjaga keseimbangan *supply* (penyediaan) and *demand* (permintaan) pendidikan melalui dukungan sumber-sumber yang luas, tidak bertumpu pada hal-hal yang berada di tangan pemerintah. Mutu

pendidikan SLTP menjadi bagian tak terpisahkan dari isu pokok tersebut sebab keberadaan penyediaan dinilai bermutu rendah oleh masyarakat tidaklah berhasil mengundang calon pemakai memanfaatkannya.

Peningkatan akses ke pendidikan SLTP memerlukan dukungan partisipasi masyarakat menggerakkan dan menyeimbangkan hubungan penyediaan dan permintaan pendidikan dan meningkatkan mutu SLTP sehingga akan memperbesar akses. Pemasaran secara sosial (*social marketing*) mengupayakan penyediaan, membangun permintaan, terutama kelompok di luar kelompok induk (*mainstream*) yang selama ini telah memanfaatkan tempat-tempat belajar yang tersedia, dan memperbaiki mutu SLTP akan memperkuat akses memasukinya.

Untuk keperluan di atas, suatu analisis hubungan kondisi penyediaan dan permintaan dikaitkan dengan konteks sosial, ekonomi dan kultural perlu dilakukan. Hal demikian harus dikerjakan berpangkal pada sifat birokratik dan rasionalnya kebijakan tunggal (strategi) nasional memperbesar akses memasuki pendidikan SLTP yang memiliki tingkat efektivitas yang sangat bervariasi (Boediono & Syarief Hidayat, 1995; Boediono, 1996). Bilamana permasalahannya adalah rendahnya atau bahkan tiadanya permintaan pendidikan, kebijakan membangkitkan permintaan tersebut akan menjadi titik sentral. Jika persoalannya terletak pada terbatasnya penyediaan, maka menggerakkan sumber-sumber yang ada di mana saja agar penyediaan lebih seimbang dengan permintaan menjadi fokus utama. Dengan demikian, studi kelayakan terhadap desain proyek perluasan pendidikan SLTP dari sisi partisipasi masyarakat perlu memberikan spesifikasi dimensi kondisi sosial, ekonomi, dan kultural kelompok sasaran

Pertanyaan kajian kelayakan usulan proyek diajukan sebagai berikut.

1. Bagaimanakah kondisi hubungan penyediaan dan permintaan pendidikan SLTP di dalam aneka konteks yang ada? Bagaimana masyarakat dapat berpartisipasi sejalan dengan profil hubungan tersebut?
2. Bagaimana kelompok masyarakat menilai mutu SLTP yang ada? Apakah kondisi dan persepsi terhadap mutu tersebut memiliki kaitan dengan variasi akses? Bagaimana masyarakat dapat berpartisipasi memperbaiki mutu SLTP agar hal yang sama terjadi untuk perbaikan akses?
3. Bagaimana pelatihan dan upaya intervensi lainnya dalam mobilisasi partisipasi masyarakat dapat dimanfaatkan?

### **Cara Penelitian**

Studi kelayakan ini berusaha mengumpulkan informasi tentang partisipasi masyarakat dalam konteks perluasan akses ke pendidikan SLTP dengan memperhatikan kondisi penyediaan, permintaan, dan mutu pendidikan SLTP yang ada di tingkat makro dan mikro. Rancangan proyek akan ditempatkan di tiga kawasan Indonesia: Bagian Barat (Jawa Barat, DKI, Sumatra), Tengah (DIY, Jawa Tengah, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat), dan Timur (Jawa Timur, Sulawesi Selatan, NTB, dan NTT).

Asesmen terhadap profil partisipasi masyarakat bersifat kualitatif dengan menggali informasi dari *stakeholder* SLTP seperti wakil orang tua siswa, kepala sekolah, guru, pejabat birokrasi pendidikan tingkat kantor wilayah, kadev dikbud, pemerintah daerah (daerah tingkat II, camat, penggerak PKK), pemuka masyarakat/ LSM, dan sumber-sumber informasi relevan lainnya.

Berhubung waktu yang tersedia relatif singkat, sampel wilayah yang diambil meliputi Sumatra Selatan untuk wilayah barat, Jawa tengah dan DIY untuk wilayah tengah, dan Jawa Timur untuk wilayah timur. Oleh karena itu teknik semacam *rapid rural appraisal* dan pengembangan informasi secara partisipatif (semacam riset aksi) seperti disiapkan oleh Dhanani dan Malik (1994) dan pola kerja *participatory appraisal* seperti dikembangkan di dalam Konsorsium pengembangan Dataran tinggi Nusa Tenggara (1994) dipilih. Di samping itu, asesmen mengajak dan mengusahakan diskusi dan dialog antara peneliti dan sumber data dengan itu aneka konsep dan maknanya diharapkan mendapatkan kesepakatan seperti diajukan oleh Robert Bellah dkk.(1985). Dialog intensif tentang isu-isu wajib belajar tingkat SLTP dengan berbagai dimensinya, permasalahan yang ada pada berbagai tingkatan/kawasan, kemungkinan partisipasi komponen-komponen masyarakat berkaitan dengan pendidikan SLTP dan komponen proyek mendatang dilakukan dengan unsur-unsur yang disebutkan di atas.

Suatu inventori menggali informasi pengalaman pelaksanaan wajib belajar dan gambaran penyediaan dan permintaan dan penggunaan fasilitas yang ada disusun dan pengecekan lewat dialog terhadap informasi yang diberikan informan juga diusahakan. Selain itu, pengamatan kondisi lingkungan dan sekolah disiapkan dan dikerjakan bersama dengan pihak-pihak yang mengurus dan menangani hal tersebut di setiap lokasi asesmen. Peneliti bersama unsur Kandep Dikbud mengunjungi sekolah dan melakukan observasi serta dialog masalah-masalah yang dijumpai. Bersama dengan unsur sekolah, peneliti mengadakan pengamatan tentang berbagai hal di sekolah, menemuhi unsur stakeholder tingkat sekolah seperti ketua BP3, kepala desa, dan komponen masyarakat penting lainnya. Lewat

teknik dan prosedur seperti ini motto “berbuat bersama dan berperan setara” oleh kelompok Korsorsium Pengembangan Dataran Tinggi Nusa Tenggara dapat dikembangkan sebagai inti kultur partisipasi dan lewat itu pula jembatan pemahaman makna yang sama terhadap kondisi, kebutuhan, dan upaya mengatasinya dapat diwujudkan sebagaimana diajukan Fullan dan Stiegelbauer (1991).

Memang, sisi lemah timbul sebab peneliti tidak terus terlibat dalam dialog yang telah dirintis lewat asesmen. Untuk itu, jalan keluar yang diajukan adalah menyusun rekomendasi agar dialog dan partisipasi serupa dapat dikembangkan. Pengembangan tim, pemasaran wajib belajar dan mobilisasi sumber-sumber masyarakat, aneka pelatihan pendukung hal-hal di atas diajukan berdasar informasi dan temuan lapangan.

Proses dialog dan diskursi yang dikerjakan di lapangan dan di kantor calon para pelaksana dan pengelola program sekaligus menjadi prosedur mengembangkan klasifikasi fenomena dan menghubungkan klasifikasi satu dengan lainnya dalam bentuk premis/ proposisi. Pro dan kontra tentang suatu fenomena dan kondisinya telah dikembangkan. Misal ketika diajukan pertanyaan dan pernyataan kemungkinan melibatkan dan menghadirkan orang tua siswa secara rutin di sekolah dan kelas, sebagian menyatakan persetujuan mereka dengan mengetengahkan argumen yang mapan. Sejumlah pihak lain justru tidak menyetujuinya oleh ketiadaan aturan untuk itu dan bahkan keterlibatan semacam itu melebihi kewenangan yang telah diatur dan dapat membawa ekses negatif. Namun lewat pengungkapan yang lebih spesifik dalam konteks mendorong partisipasi orang tua dan masyarakat, kesepakatan itu baik administratif, akademik teknis, finansial, sosial, moral, dan kemanfaatan lainnya berkembang positif. Lewat prosedur ini informasi diperoleh dan penafsiran

dilakukan dengan memperhatikan kriteria yang disinyalkan oleh proyek (TOR) dan penafsiran para calon pengelola dan pelaksanaannya.

Oleh sifat interaktifnya sistem persekolahan, dua pendekatan terhadap pengembangan partisipasi masyarakat perlu dikaji dan dikembangkan yaitu (1) partisipasi masyarakat dengan basis sekolah (*school-based community participation*) dan (2) partisipasi masyarakat berbasis masyarakat (*community, between schools-based community participation*). Yang pertama sangat konvensional, setiap sekolah melakukannya untuk kepentingan sekolah secara individual. Yang kedua nonkonvensional, belum banyak dilakukan baik oleh sekolah-sekolah di suatu lingkungan teritorial yang sama maupun oleh sekolah-sekolah dalam suatu perkumpulan yang sama seperti sekolah swasta di bawah yayasan yang sama. *System delivery* baru terhadap berbagai intervensi, alokasi, dan mobilisasi sumber-sumber bersama telah dikembangkan di percaturan pendidikan untuk keperluan efisiensi, ekuiti, ataupun efektivitas pemanfaatan sumber-sumber tersebut.

### **Hasil Asesmen dan Pembahasan**

#### **Profil akses dalam dimensi penyediaan dan permintaan pendidikan SLTP**

Aturan kebijakan mengatakan bahwa peningkatan akses memasuki SLTP perlu menjaga keseimbangan antara penyediaan tempat belajar dan permintaan untuk memasukinya. Penambahan peluang nyata berupa tempat-tempat di pusat belajar harus semakin mendekati pemakai dan menyesuaikan dengan kondisi pemakai dengan tekanan fleksibilitas. Profil hubungan penyediaan dan permintaan mengisyaratkan perbedaan usaha menggerakkan partisi-

pasi masyarakat. Ada empat kategori profil utama (konseptualisasi kategorik telah diajukan oleh Boediono dan Hidayat Syarif (1995) dan Boediono (1996).

Kategori pertama adalah kawasan dengan peringkat tinggi baik penyediaan maupun permintaan (*well-balanced high supply-high demand*) berada di daerah kaya, konteks perkotaan. Mereka memiliki sekolah dengan besaran medium dan atau besar dan sekolah mereka relatif baik. Estimasi besarnya merentang antara 10-15% sekolah pada agregasi unit teritorial di ibu kota propinsi dan kabupaten/ kota madya. Sekolah-sekolah ini memiliki dan diberi kesempatan memilih siswa berdasarkan NEM tinggi. Karena ada korelasi antara indek pretasi dan latar belakang soioal, ekonomik, dan kultura, sekolah ini telah menikmati kemudahan menggerakkan partisipasi masyarakat.

Kategori kedua berisi wilayah dan kondisi yang memiliki tingkat penyediaan tinggi tetapi permintaannya rendah (*high supply-low demand*). Diperkirakan profil ini meliputi mayoritas penduduk suatu kawasan berkisar antara 75-85%. Biasanya penduduk di kategori ini berpenghasilan rendah sampai medium bawah oleh sebab itu ketergantungan mereka terhadap sumber-sumber dari pemerintah sangat tinggi dalam keadaan yang serba terbatas. Media dan komunikasi yang bagus berhasil membangkitkan aspirasi dan permintaan pendidikan lebih cepat dari kemampuan ekonomi mereka, terutama menyisihkan dana untuk keperluan pendidikan. Sumber-sumber guna memperbaiki sarana dan prasarana pendidikan agar akses mereka semakin besar terbatas. Permasalahan penyediaan tempat-tempat belajar problematik di kawasan padat penduduk seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung, Sumatra Selatan, Sumatra Utara, dan Sulawesi Selatan. Potensi partisipasi



masyarakat sesungguhnya besar; melalui cara-cara yang tepat sumber-sumber yang ada pada mereka dapat digerakkan.

Di kawasan ini suatu hal paradoksal terjadi seperti banyaknya sistem SLTP tak mampu menjaring dan mengundang orang tua menyekolahkan anak-anak mereka. Upaya menaikkan rasio kelas-siswa, pembukaan kelas paralel dan filial, serta pengadaan SLTP terbuka di sektor pemerintah menjadi semacam kebijakan penghasil masalah berupa pergeseran arus ke sekolah negeri dari yang mestinya teralokasikan ke sekolah swasta. Banyak sekolah SLTP swasta kekurangan siswa dan terpaksa menyerahkan kembali ijin operasional mereka seperti terjadi di DIY, Jawa Timur, Jawa Tengah, Bali, Jawa Barat, Kalimantan Selatan. Alasannya adalah mutu yang kurang memadai, biaya relatif lebih mahal. Kesepakatan tentang hal ini sangat luas dari berbagai *stakeholder* SLTP.

Kategori ketiga adalah bercirikan rendahnya permintaan disertai oleh tingginya penyediaan fasilitas SLTP seperti terdapat di wilayah yang secara ekonomik terbuka alternatif kegiatan pesaing kegiatan belajar di sekolah. Fenomena ini terdapat di sekitar tumbuhnya pabrik-pabrik yang mempekerjakan anak-anak usia muda seperti di sekitar Ungaran, Jawa Tengah, Gresik dan Sidoarjo, Jawa Timur, kawasan industri di Jawa Barat, pusat-pusat wisata dan pembuat cinderamata di Bali dan Yogyakarta, serta daerah-daerah asal migrasi serta tingkat wilayah yang memiliki fertilitas turun secara monotonik. Orang-orang tua yang peduli terhadap pendidikan bermutu, termasuk pendidikan fungsional bagi kepentingan ekonomi tak mau menyekolahkan anak-anak agar tak menghalangi kebutuhan mereka akan tenaga yang memiliki keterampilan yang dibutuhkan. Di perkampungan nelayan, di perkebunan seperti di dataran tinggi Dieng hal semacam ini terjadi. SLTP swasta dan bahkan SLTP negeri yang

ada dengan mutu yang kurang memadai terpaksa kekurangan peminat (*supply* tinggi/ lebih dari *demand* terutama juga tentang mutu).

Berhadapan dengan fenomena ini, permasalahannya adalah (1) membangun permintaan pendidikan di kalangan mereka yang berada di pinggi dan bawah secara ekonomi, sosial dan kultural; (2) realokasi dan menata kembali penyebaran sekolah, termasuk fleksibilitas waktu belajar dan pemanfaatan teknologi; (3) pemberian bea siswa guna mengurangi beban ekonomi keluarga dan dukungan agar beban sosial dan kultural berkurang; dan (4) memperbaiki mutu sekolah lewat kegiatan pemberian bantuan teknis dan kompensasi agar orang tua tertarik memanfaatkan peluang.

Tipe atau kategori keempat adalah fenomena wilayah yang memiliki tingkatan rendah baik sisi penyediaan maupun permintaan (*low supply- low demand*). Hal ini dapat dijumpai di daerah miskin/kumuh, wilayah terpencil dan terisolir, semi nomaden seperti petani dan nelayan berpindah-pindah. Hal demikian terdapat luar Jawa seperti Bengkulu, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Maluku, dan Irian Jaya. Mereka tinggal di sekitar hutan dan sungai, berpencaran secara luas dalam kesatuan-kesatuan kecil, sukar dijangkau dari luar, dan pelayanan umum akan sangat mahal. Penempatan guru mengalami hambatan oleh tingginya permintaan pindah ke luar dari penempatan saat pengangkatan mereka. Diperkirakan besaran kelompok ini sekitar 5 sampai 10 %. Unit sekolah yang tersedia berada dalam jarak tempuh yang cukup lama, walaupun jarak fisik sekitar 10-15 km tanpa jalur transportasi yang memadai. Tidak jarang ayah mereka tidak berada di rumah secara teratur, oleh sebab itu anak usia SLTP secara sosial, kultural, dan ekonomik menjadi pengganti peranan ayah/ lelaki. Bahkan fenomena ini terdapat juga di Jawa di daerah pegunungan.

Uluran tangan dari luar sangat diperlukan. Di wilayah ini telah beroperasi usaha-usaha kemanusiaan dan keagamaan yang relatif telah mengurangi permasalahan yang ada, walaupun dari segi mutu banyak dipermasalahkan. Keadaan ini terdapat juga di negara berkembang lainnya seperti di negara-negara Afrika terbelakang yang telah banyak dikaji orang. Pemanfaatan teknologi, sekolah berasrama mungkin salah satu cara mengatasinya. Insentif buat tenaga guru, sekolah-sekolah kecil, dan membangkitkan voluntarisme dapat diusahakan menghadapi masalah ini.

### **Menggerakkan partisipasi**

Praktik dan potensi partisipasi masyarakat dalam pendidikan yang telah ada menjadi modal dasar upaya penggalangannya. Kondisi kedua hal tersebut bervariasi antar sekolah, antar lokasi, dan antar isu-isu yang disajikan untuk itu. Dari berbagai dialog dan analisis kasus-kasus menggerakkan peranan serta masyarakat yang sifatnya insidental, musiman, rutin, maupun yang sistematis mantap, struktur di balik itu terlihat dalam prinsip-prinsip berikut. (1) Inti partisipasi adalah kemitraan (*partnership*) yaitu kesetaraan dan kebersamaan oleh pengembangan konsensus berbagai hal; (2) Adanya kemanfaatan dan keuntungan bersama para partisipan, dalam arti unsur merugikan satu pihak secara langsung maupun tidak langsung menurunkan kadar partisipasi. (3) Memberikan suara (*voice*) memberi peluang hadirnya partisipasi, pengakuan keberadaan dan hak orang lain sangat penting untuk mengundang partisipasi mereka; (4) Manajemen terbuka dan transparan merupakan prinsip penting untuk mengundang dan memelihara partisipasi pendidikan masyarakat dan orang tua; (5) Saling mempercayai (*mutual trust*) menjadi jiwa partisipasi antar mereka yang terlihat dan berkepentingan; (6) Akontabilitas tak dapat

diabaaikan dalam partisipasi pendidikan oleh masyarakat dan orang tua; (7) Agar partisipasi hadir, berkembang dan berkesinambungan, informasi yang benar, tepat waktu, dan bermakna perlu tersedia dan disebarluaskan. Akhirnya; (8) inti lainnya adalah selalu mengusahakan dan membangun pelayanan yang baik dan semakin baik. Orang akan mereka terus ingin berpartisipasi oleh adanya pelayanan yang baik.

Penerapan prinsip-prinsip partisipasi tersebut bervariasi antara kasus, tetapi mereka harus dalam suatu konfigurasi yang berbeda-beda oleh konteks yang beraneka ragam pula. Prinsip-prinsip tersebut dinamik, produk pengalaman, dan dapat dimodifikasi lewat pelatihan dan dialog.

### **Kesimpulan**

Diversifikasi kebijakan dan strategi meningkatkan akses memasuki SLTP perlu dilakukan dengan memperhatikan peta keseimbangan penyediaan dan permintaan pendidikan SLTP. Mobilisasi sumber-sumber masyarakat perlu didasarkan atas kondisi yang terkait dengan keseimbangan penyediaan dan permintaan. Dengan itu sasaran menggerakkan partisipasi menjadi lebih jelas dan langsung. Partisipasi masyarakat tidak akan timbul secara otomatis, melainkan melalui perencanaan baik tingkat makro maupun mikro disertai usaha-usaha pelatihan yang cocok dengan kebutuhan. Implementasi prinsip-prinsip partisipasi perlu diusahakan dengan menyesuaikan terhadap tuntutan dan kebutuhan konteks dan urusan.

### **Daftar Kepustakaan**

Bellah, Robert N. et al. (1985). *Habits of the heart: Individualism and commitment in American life*. USA: The University of California Press, Ltd.

- Boediono. (1996). *Pelaksanaan wajib belajar sebagai proses pembangunan ekonomi*. Jakarta: Pusat Penelitian Sains dan Teknologi, Lembaga Penelitian Universitas Indonesia.
- Dhanani, Shafiq & Malik, Adam. (1994). "Penilaian pedesaan dalam waktu singkat untuk identifikasi dan persiapan proyek: Petunjuk, prinsip, metode, dan catatan pelatihan". *Technical Report No. 48. Regional Manpower Planning and Training, Bureau of Manpower, BAPPENAS: Loan 3134-IND*. Jakarta.
- Direktorat Sekolah Swasta, Ditjen PDM, Depdikbud. (1993). *Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 059/1993 tentang pedoman pemberian bantuan kepada sekolah swasta*. Jakarta.
- Fullan, Michael G. & Stiegelbauer, Suzanne. (1991). *The new meaning of educational change*. New York: Teacher College Press.
- Ministry of Education and Culture. DGPSE, DSE. (1996). "Community participation in school development: Access, demand, and school construction". Submitted by Suyata. *Technical Report No. 2*. Jakarta: MOEC/ DGPSE/ DSE.
- Shaeffer, Sheldon. (1992). "Collaborating for educational change: The role of parents and the community in school improvement". *The International Journal of Educational Development, 12, 4: 277-295*.
- Studio Driya Media. (1994). *Participatory rural appraisal: gambaran teknik-teknik. Berbuat bersama, berperan setara: Pengkajian dan perencanaan program bersama masyarakat*. Bandung: Studio Driya Media untuk Konorsium Pengembangan Dataran Tinggi Nusa Tenggara.

Suyata & Sidharto, Suryati. (1995). "Evaluasi nasional pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun". *Laporan teknis disampaikan kepada Direktorat Pendidikan Menengah Umum/ Proyek PMPWB Jakarta.*